

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Volume pertumbuhan usaha perbankan syariah dalam kurun waktu tahun - tahun terakhir seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan yang cukup pesat. Khususnya bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan baik dari jumlah cabang yang dibuka, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Dana yang disalurkan kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2011).

Pertumbuhan usaha perbankan syariah juga diiringi dengan kompleksitas kegiatan usaha bank sebagai penghimpun, perantara dan penyalur dana masyarakat serta kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai prinsip utama bank syariah. Selain persaingan usaha yang semakin ketat, hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan risiko yang dihadapi seiring dengan peningkatan volume pertumbuhan nilai asset, dana pihak ketiga (DPK) dan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Perbankan Syariah juga diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang fokus terhadap pengembangan sektor riil terutama Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

Peningkatan volume perbankan syariah terjadi setelah dikeluarkannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disebutkan dalam Outlook Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012 dan 2013 bahwa

marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8 persen pada akhir 2011 meningkat menjadi 4,3 persen di akhir tahun 2012. Selain *Marketshare*, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor yang didirikan, sehingga area pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas. Dari segi keuangan, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.1 dana pihak ketiga pada oktober 2011 dari Rp 101,57 triliun bertambah menjadi Rp 134,45 triliun pada Oktober 2012, dan dalam periode yang sama jumlah aset meningkat menjadi Rp 174,09 triliun dan penyaluran dana meningkat menjadi Rp 135,58 triliun. Dengan jumlah aset yang besar, dapat diindikasikan bank syariah telah mampu mewujudkan kinerja yang maksimal dan mengelola risiko dengan baik.

Tabel 1.1

Jumlah Aset, DPK dan Penyaluran Dana BUS dan UUS

| Volume Usaha | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aset | 85,85 | 127,19 | 174,09 |
| Dana Pihak Ketiga | 66,48 | 101,57 | 134,45 |
| Penyaluran Dana | 83,81 | 122,73 | 135,58 |

Sumber : Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2012 dan 2013

Pertumbuhan yang pesat juga didukung dengan kinerja yang bagus, baik dari segi profitabilitas maupun pengelolaan dari risiko – risiko yang harus dihadapi. Bank syariah kini mulai menunjukkan bahwa bank syariah mampu menggunakan aset, modal dan mengontrol pembiayaannya dengan baik, tercermin dari rasio ROA, ROE dan NPF sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.2. Pertama, untuk aktivitas penggunaan aset yang dihitung menggunakan rasio ROA,

bank syariah mampu menghasilkan 2,11 persen pada Oktober 2012. Kedua, untuk aktivitas penggunaan modal yang dihitung menggunakan rasio ROE, pada periode yang sama bank syariah mampu memberikan pengembalian hingga 25,5 persen. Setelah bank syariah mampu meningkatkan jumlah penyaluran dana (pembiayaan) perbankan syariah menjadi Rp 135,58 Triliun pada akhir tahun 2012 sesuai dengan sajian pada Tabel 1.2, tentu saja peningkatan jumlah pembiayaan ini harus memperhatikan aspek risiko gagal bayar. Pada periode yang sama, bank syariah mampu mengontrol risiko gagal bayar yang dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) menjadi 2,58 persen. Sehingga, dapat dikatakan bank syariah telah mengontrol aktivitas pembiayaannya dengan baik karena telah mampu menurunkan angka NPF.

Tabel 1.2

Rentabilitas dan Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

| Rasio | 2010 (Okt) | 2011 (Okt) | 2012 (Okt) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Return on Assets</i> (ROA) | 1,79% | 1,75% | 2,11% |
| <i>Return on Equity</i> (ROE) | 24,30% | 17,43% | 25,5% |
| <i>Non Performing Financing</i> (NPF) | 3,95% | 3,11% | 2,58% |

Sumber : Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2012 dan 2013.

Sejauh ini, kapasitas pembiayaan bank syariah di Indonesia masih terbatas pada sektor dalam negeri dan sektor riil. Oleh karena itu, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2012 tidak berdampak pada industri perbankan nasional. Sesuai dengan prinsip syar'i nya, bank syariah tidak diperkenankan menggunakan ataupun berinvestasi pada produk-produk berbasis bunga dan spekulasi. Walaupun begitu, bank syariah tetap perlu memperkuat ketahanan sistemnya menghadapi

berbagai risiko. Beberapa jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah bank menurut Greuning dan Iqbal (2011 : 64) antara lain; risiko keuangan, risiko operasional, risiko bisnis dan risiko kejadian. Sebagai lembaga keuangan, tentunya risiko keuangan menjadi hal yang penting untuk selalu diperhatikan oleh Bank, walaupun begitu bank juga perlu mengantisipasi seluruh kemungkinan risiko yang dapat terjadi.

Berikut ini beberapa kejadian risiko yang terjadi pada sejumlah bank. Pertama, kasus antara Bank Bukopin Syariah dengan Manajer keuangan PT. Medixie Sekawan Utama yang diduga melibatkan oknum pegawai Bank Syariah Bukopin karena ada penarikan tanpa otorisasi yang dilakukan dalam waktu singkat dari 7 Januari hingga Maret 2010 jumlahnya mencapai Rp 7 miliar (Okezone, 2011). Selain itu, Bank Muamalat juga sempat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa yang membahas perubahan susunan Dewan Komisaris pada tahun 2009, sejak Aulia Pohan salah satu anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat divonis dengan tindak pidana korupsi. Kejadian risiko seperti hal tersebut dapat menyebabkan kerugian baik bersifat finansial maupun non-finansial. Dorfman (2004 : 4) menjabarkan *Risk Management* adalah “*is the logical process used by businesses and individuals to deal with their exposures to loss*”. Sehingga, bank memerlukan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif untuk menghindarkan dari kerugian.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank sekaligus meminimalisir risiko maka bank syariah dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance*

(GCG) demi melindungi kepentingan *stakeholder*-nya. Ghillyer (2008 : 79), menjelaskan “*Corporate Governance is concerned with how well organizations meet their obligations to all these people*”. Penerapan tata kelola merupakan wujud pertanggungjawaban bank bahwa bank syariah telah dikelola dengan baik, profesional, hati – hati (*prudent*) dan etis dengan tetap berupaya meningkatkan nilai bagi pemegang saham (*return*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Tata kelola dilandasi dengan prinsip “TARIF”. TARIF merupakan kepanjangan *Transparent* (Terbuka), *Accountable* (Akuntabel), *Responsible* (Pertanggung jawaban), *Independent* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran).

Saat ini, infrastruktur tata kelola bank syariah di Indonesia telah didukung oleh peran Bank Indonesia. Peran tersebut berupa telah dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah serta pengawasannya, persyaratan pemilik dan pengurus, aturan dan mekanisme *fit and proper test*, kewajiban bank untuk membentuk komite, ketentuan *disclosure*, penerapan manajemen risiko dan terbentuknya lembaga pengawasan nasional. Selain oleh Bank Indonesia, bank syariah di Indonesia juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sedangkan di lingkup internal, bank syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Bank syariah menawarkan produk dan jasa dengan menggunakan dasar *Profit-Loss Sharing* (PLS) atau disebut bagi hasil keuntungan atau kerugian, bukan bunga. Sesuai dengan ciri khas bank syariah adalah komitmen untuk melakukan kegiatan berdasarkan syariat. DPS setiap bank syariah akan meninjau

setiap produk dan transaksi untuk memastikan semua aspek sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. DPS merupakan bagian dari kerangka kerja tata kelola perusahaan (Ghayad, 2008).

Regulasi mengenai tata kelola telah diresmikan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Setiap tahun, bank syariah wajib mempublikasikan Laporan hasil *Self Assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola yang dicantumkan pada Laporan Tahunan ataupun Laporan *Good Corporate Governance*. Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan tata kelola yang dilakukan masing-masing bank, baik dalam nilai komposit dan predikat komposit, yang merupakan hasil akhir dari laporan pelaksanaan prinsip tata kelola.

Setelah dipublikasikannya aturan mengenai Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* pada tahun 2009, maka BUS dan UUS resmi mulai melaksanakan dan melaporkan Laporan Tata Kelola pada tahun 2010. Pada setiap laporan, akan memuat nilai dari 11 (sebelas) komponen penilaian tata kelola, nilai komposit juga predikat komposit, yang merupakan pernyataan BUS atau UUS atas kesesuaian pelaksanaan tata kelola terhadap komponen-komponen yang harus dipatuhi. Dari sebelas komponen penilaian tata kelola, ada 2 (dua) komponen penilaian tata kelola Bank Syariah yang berbeda dengan Bank

Konvensional, yaitu adanya komponen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Dewan Pengawas Syariah dan Pelaksanaan Prinsip Syariah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji hubungan tata kelola dengan kinerja perbankan. Hasil penelitian Peni dan Vahaama (2011) menunjukkan bahwa saat terjadi krisis tahun 2008, bank yang mekanisme tata kelolanya kuat memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Belkhir (2009) meneliti satu aspek tata kelola, yakni tentang efektivitas dewan direksi terhadap kinerja bank. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara jumlah direksi dengan kinerja bank yang diukur dengan Tobin's Q dan ROA. Di Indonesia, beberapa penelitian serupa juga telah dilakukan. David Tjondro dan R. Wilopo (2010) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil temuannya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap komponen profitabilitas bank yakni ROA, ROE, NIM dan PER namun tidak memiliki pengaruh terhadap *return* saham.

Untuk hubungan tata kelola dengan kinerja dan risiko, terdapat beberapa penelitian antara lain; Aebi, Sabato dan Schmid (2011) meneliti tentang struktur pertanggungjawaban seorang CRO (*Chief Risk Officer*) dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Temuan dari penelitian ini adalah praktek tata kelola bank memiliki hubungan terhadap kinerja bank, serta CRO bank yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris memiliki kinerja yang lebih baik pada saat krisis daripada CRO yang bertanggungjawab ke CEO (Dewan

Direksi). Untuk penelitian di Indonesia, Eduardus Tandelilin, Hermendeito Kaaro, Putu Anom Mahadwartha dan Supriyatna (2007) meneliti hubungan antara praktek tata kelola, kinerja dengan risiko pada bank umum di Indonesia. Temuan dari penelitian ini pun menyatakan bahwa praktek tata kelola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen risiko dan kinerja suatu bank.

Untuk hubungan tata kelola dengan kinerja dan risiko di bank syariah Indonesia, terdapat satu penelitian yaitu Dhaniel Syam dan Taufik Najda (2012) yang meneliti kualitas penerapan tata kelola Bank Syariah di Indonesia terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan.

Sejauh ini penelitian di bidang tata kelola perbankan masih banyak yang menggunakan bank konvensional sebagai objek penelitian. Sedangkan, untuk penelitian dengan topik tata kelola perbankan syariah serta menguji pengaruhnya terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah masih sangat terbatas. Selain itu, untuk kasus perbankan syariah di Indonesia, implementasi tata kelola baru secara efektif dilaksanakan dan dilaporkan pada tahun 2010, sehingga masih sedikit penelitian yang menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya kualitas tata kelola, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan risiko pada perbankan syariah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "TATA KELOLA, KINERJA RENTABILITAS DAN RISIKO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH".

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tata kelola yang telah diimplementasikan oleh perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah praktek tata kelola mampu meningkatkan kinerja rentabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah praktek tata kelola mampu menurunkan risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji praktek tata kelola perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh praktek tata kelola dalam meningkatkan kinerja rentabilitas perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh praktek tata kelola dalam menurunkan risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bank Syariah di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi bank Syariah dalam mempraktekkan prinsip tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengelola Risiko.

2. Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka pengembangan sistem dan mekanisme penerapan tata kelola pada perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan penyempurnaan regulasi dan panduan *Best Practice* dan pembentukan lembaga yang terkait dalam mendorong praktek tata kelola perbankan syariah.

3. Peneliti

Diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan mengenai praktek tata kelola serta pengaruhnya pada kinerja dan risiko perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan tesis dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab.

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah penelitian berupa alasan yang mendukung topik permasalahan, perumusan masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan ulasan singkat beberapa hasil penelitian terdahulu yang disertai dengan landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Teori diuraikan secara sistematis yang disusun mulai dari teori yang bersifat umum menuju teori yang khusus yang dapat mengantar peneliti untuk menyusun kerangka pikiran yang pada akhirnya dapat diformulasikan menjadi hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka yang dijadikan pedoman penyelesaian masalah penelitian yang terdiri dari tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang prosedur Tahap penelitian ini diawali dengan identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh menjadi sampel penelitian. Bab ini juga berisi tentang deskriptif data penelitian yang diperoleh berdasarkan variabel yang digunakan, serta hasil analisis statistik dan pembuktian hipotesis secara statistik. Bab ini diakhiri dengan uraian penalaran dari hasil penelitian secara teoritis dan empiris sehingga mengarah kepada pemecahan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang meliputi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Bab ini juga berisi keterbatasan penelitian baik secara teoritis, metodologis ataupun teknis dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi peneliti selanjutnya.